

## Keterbandingan Standar Akuntansi Sewa PSAK 30 Sebelum Dan Setelah Konvergensi IFRS

Armelia Ari Firdatama

Fakultas Ekonomi,, Universitas Tidar

Korespondensi penulis: [armelia.ari.firdatama@students.untidar.ac.id](mailto:armelia.ari.firdatama@students.untidar.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze the comparability of lease accounting standards, PSAK 30, before the convergence of IFRS (International Finance Reporting Standard) which was carried out in 2008 to 2015. The revision of PSAK 30 is said to have a significant difference between the two revisions, namely the 2007 revision and the 2011 revision. This research was conducted using qualitative methods on the form of literature studies as from documents, articles, journals, and books. The results of the study indicate that there are differences in the treatment of leased assets from the two revisions of PSAK 30, which include grammar, explanation, treatment of economic useful lives, minimum lease payments, and treatment of land and building assets.*

**Keyword:** PSAK 30, IFRS Convergence, Financial Report

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keterbandingan standar akuntansi sewa yaitu PSAK 30 sebelum adanya konvergensi IFRS yang dilakukan pada 2008 hingga tahun 2015. Dilakukannya revisi terhadap PSAK 30 tersebut disebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan diantara kedua revisinya yaitu Revisi 2007 dan Revisi 2011. Penelitian ini dikerjakan dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur dari dokumen, artikel, jurnal, dan buku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan atas aset sewa dari kedua revisi PSAK 30 tersebut, antara lain terdapat pada tata bahasa, penjelasan, perlakuan umur manfaat ekonomis, pembayaran sewa minimum, dan perlakuan atas aset tanah dan bangunan.

**Kata Kunci:** PSAK 30, Konvergensi IFRS, Laporan Keuangan

### PENDAHULUAN

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, sebuah perusahaan diharuskan untuk menggunakan standar akuntansi nasional dan internasional sebagai bentuk penggambaran kondisi keuangan perusahaan. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) merupakan jenis standar akuntansi nasional yang dibuat oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang mencakup pembuatan, penyusunan, pencatatan, serta penyajian data-data keuangan perusahaan. Sedangkan IFRS (*International Finance Reporting Standard*) merupakan standar akuntansi internasional yang dibuat oleh IASB (*international Accounting Standards Board*) yang mengatur tentang bagaimana sebuah jenis transaksi tertentu dan aktivitas akan dilaporkan di laporan keuangan. Standar ini menjadi dasar pelaporan global yang konsisten untuk memberikan investor dan pengguna lainnya dalam membandingkan *financial performance* dari perusahaan publik yang terdaftar di dunia.

Sebagaimana kebutuhannya untuk diterima di dunia internasional dan meningkatkan kualitas informasi akuntansi perusahaan, Indonesia menciptakan standar akuntansi nasional yang merupakan konvergensi dari standar internasional. Konvergensi IFRS (*International*

*Finance Reporting Standard*) dilakukan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) pada tahun 2008 untuk diberlakukan pada tahun 2012 serta pada tahun 2012 untuk diberlakukan pada tahun 2015. Dasar konvergensi yang dilakukan adalah IFRS 16—*Leases*. Implementasi standar IFRS 16 mempengaruhi secara signifikan terhadap pengakuan sewa, pengukuran, dan penutupannya. Tidak seperti IAS (*Interantional Accounting Standard*) 17 yang digunakan sebelumnya dimana akuntansi sewa mengharuskan *Lessor* (pemilik aset sah) dan *Lessee* (pihak yang menerima hak penggunaan aset) untuk membedakan apakah sewa tersebut merupakan operasi atau hanyalah sewa pembiayaan. IFRS 16 hanya mensyaratkan perusahaan dalam pertanggungjawaban sewa secara efektif, serta bagaimana sewa pembiayaan dari perspektif penyewa. Penyewa siwajaibkan dalam mengakui aset dari Hak Penggunaan dengan kewajiban terkait di neraca mereka. Seluruh aset dan liabilitas baru tersebut berkemungkinan besar menyiratkan perubahan secara dramatis terhadap rasio utama yang ditentukan dengan mengacu pada Laporan Keuangan Tahunan dari penyewa.

Salah satu PSAK yang mendapatkan konvergensi dari IFRS adalah PSAK 30 mengenai Akuntansi Sewa Guna Usaha pada tanggal 24 Agustus 1994 berdasarkan US GAAP sebagai *rule based standard*. Namun dikarenakan standar akuntansi yang digunakan secara global berubah menjadi *principle based* IFRS, maka PSAK 30 kemudian direvisi menjadi PSAK 30 (Revisi 2007) dan direvisi kembali menjadi PSAK 30 (Revisi 2011). PSAK 30 (Revisi 2007) dan PSAK 30 (Revisi 2011) memiliki perbedaan pada lingkup standar, umur manfaat, ketentuan sewa tanah dan ketentuan bangunan, serta perombakan bahasa yang dipakai.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahardika Putra Laksana dan Sudrajat (2019), berkesimpulan bahwa PSAK 30 menggunakan sewa pembiayaan untuk mengukur seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa nilai-rendah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Farid Hardiansyah Haris dan Rachmawaty Rachman (2020), berkesimpulan bahwa penerapan PSAK 30 (Revisi 11) di PT BFI Finance Indonesia mempengaruhi pengklasifikasian transaksi sewa menjadi sewa pembiayaan (*financial lease*) yang mana pihak leese pada akhir masa sewa mempunyai hak dalam memiliki aset disewa guna usaha dan dialihkan secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat yang berkaitan dengan kepemilikan aset.

Pada PSAK 30, penyusutan aset tetap disewakan diukur menggunakan metode garis lurus. Sewa guna usaha merupakan aktivitas pembiayaan berbentuk pengadaan barang modal sewa guna dengan hak opsi (*finance lease*) ataupun sewa guna tanpa adanya hak opsi (*operating lease*). Pengklasifikasian sewa menurut PSAK 30 terbagi menjadi dua, yaitu sewa

pembiayaan (*finance lease*) dan sewa operasi (*operating lease*). Klasifikasi ini disetujui di masa awal sewa di antara kedua pihak untuk melakukan pembaruan sewa.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki tujuan dalam menggambarkan kondisi perusahaan melalui laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas sebagai alat penilaian bagi pengguna laporan keuangan seperti investor, penyedia modal, dan kreditor sebagai langkah pengambilan keputusan. Berdasarkan PSAK No.1 Tahun 2009, laporan keuangan menyajikan posisi keuangan dan kinerja suatu entitas usaha secara terstruktur. Laporan keuangan umumnya dibuat oleh manajemen tiap departemen sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap aktivitas-aktivitas yang dibenbankan kepada departemennya, yang kemudian akan diaudit oleh baik auditor internal maupun auditor independen. Sedangkan menurut IASB (*International Accounting Standard Board*), laporan keuangan ditujukan untuk menyajikan informasi berupa posisi keuangan perubahan posisi keuangan, dan kinerja keuangan sebuah perusahaan yang digunakan oleh berbagai pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Adapun tujuan dari dilakukannya pelaporan keuangan, antara lain yaitu:

1. Menyajikan informasi kepada manajemen sebagai dasar perencanaan, analisis, pengambilan keputusan, dan *benchmarking*.
2. Menyajikan informasi kepada pemegang saham dan publik tentang terdaptarnya perusahaan terkait di berbagai aspek organisasi.
3. Menyajikan informasi mengenai cara entitas dalam mengadakan dan mengalokasikan sumber daya.
4. Menyajikan informasi kepada auditor dan penegak hukum atas asurans dan investigasi suatu kasus.
5. Menyajikan informasi kepada *shareholders* tentang manajemen kinerja entitas dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab finansial.

### Konvergensi IFRS

Konvergensi IFRS dilakukan pertama kali pada tahun 2008 atas keputusan IAI dengan menggunakan dua strategi. *Big Bang Strategy* merupakan strategi dimana pengadopsian IFRS dilakukan secara penuh tanpa adanya tahapan-tahapan tertentu dan umumnya dilakukan oleh negara maju. Sedangkan *Gradual Strategy* merupakan strategi dimana pengadopsian IFRS dilakukan secara bertahap dan umumnya dilakukan oleh negara berkembang.

Konvergensi IFRS di Indonesia dilakukan melalui dua tahap atau fase, yaitu pada 2008-2012 dan 2012-2015. Pada fase pertama, telah dilakukan komitmen publik oleh Indonesia pada tanggal 8 Desember 2008 dengan targetnya merupakan pemberlakuan secara efektif atas standar akuntansi yang mengacu pada IFRS pada tahun 2012. Pada fase kedua merupakan fase penyeluruhan konvergensi. Fase ini menjadi fase dimana cukup banyak PSAK baru yang dikeluarkan oleh DSAK berlaku efektif.

Langkah konvergensi IFRS dinilai perlu untuk meningkatkan pemahaman mengenai kondisi keuangan perusahaan sehingga dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan terbaik berdasarkan informasi yang disediakan. Bagi perusahaan multinasional, pengadopsian IFRS dapat bermanfaat pada dua aspek, yaitu aspek biaya dan aspek biaya modal. Pada aspek keefisienan biaya, perusahaan multinasional tidak diharuskan membuat laporan yang berbeda untuk investor luar negeri maupun investor dalam negeri dikarenakan IFRS sudah digunakan secara global dan mempercepat pelaporan. Sedangkan dari aspek biaya modal, perusahaan akan diuntungkan karena rendahnya biaya modal karena laporan keuangannya mudah dimengerti oleh para investor.

Pengadopsian IFRS memberikan reaksi baik di bidang keuangan dengan dibuktikan adanya peningkatan kualitas pada proses akuntansi dan informasi pada laporan keuangan di berbagai negara seperti Inggris, China, Australia, serta mengurangi keasimetrisan biaya modal. Indonesia telah berencana mengadopsi IFRS ke dalam PSAK pada tahun 2009. IFRS diharapkan mampu memperbaiki kredibilitas dan keterbandingan laporan keuangan di berbagai Negara.

### **PSAK 30**

Standar Akuntansi PSAK 30 mengenai sewa merupakan standar hasil adopsi IAS 17 dan IFRS 16. Sewa merupakan suatu perjanjian antara lessor dan lessee atas penggunaan sebuah aset dalam periode waktu yang disepakati. Dalam PSAK 30, diatur mengenai perlakuan dan penjelasan mendetail mengenai klasifikasi sewa, pengakuan awal sewa, pengukuran setelah pengakuan awal, pengungkapan, ketentuan transisi, transaksi jual dan sewa balik, tanggal efektif, serta penarikan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dimana peneliti membandingkan standar akuntansi PSAK 30 atas perlakuan aset sewa sebelum dan setelah konvergensi IFRS. Penelitian ini menggunakan studi literatur berupa dokumen, artikel, jurnal, dan buku dengan rumusan masalah yang sejalan dengan topik dari penelitian ini. Keluaran dari penelitian ini berupa artikel konseptual yang dapat memberi memberikan perspektif baru terhadap permasalahan yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perbedaan PSAK 30 (Revisi 2007) dan PSAK 30 (Revisi 2011)

No	Kriteria	PSAK 30 (Revisi 2007)	PSAK 30 (Revisi 2011)
1.	Definisi Sewa	Suatu perjanjian yang dilakukan oleh lessor dan lessee yang didalamnya ada pemberian hak kepada lessee atas aset selama periode waktu yang disepakati.	Sebuah perjanjian antara lessor dan lessee, dimana lessee berhak menggunakan sebuah aset selama periode waktu yang disepakati. Imbalan dari pemberian hak tersebut berupa pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor.
2.	Klasifikasi Sewa	Sewa Pembiayaan ( <i>Finance Lease</i> ), merupakan sewa pengalihan substansial atas seluruh risiko dan manfaat yang berkaitan dengan pengalihan kepemilikan suatu aset. Sewa Operasi ( <i>Operating Lease</i> ), merupakan sewa selain sewa pembiayaan, dimana sewa tidak dialihkan secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat yang berkaitan dengan kepemilikan atas suatu aset.	Sewa Pembiayaan merupakan sewa pengalihan substansial atas seluruh risiko dan manfaat yang berkaitan dengan pengalihan kepemilikan suatu aset. Sewa operasi adalah sewa selain sewa pembiayaan.
3.	Pengukuran setelah Pengakuan Awal	Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian beban keuangan dan bagian pelunasan kewajiban. Beban	Pembayaran sewa dilakukan dalam satu periode (di luar biaya jasa) dan diterapkan atas investasi sewa bruto untuk mengurangi pokok dan

		keuangan dialokasikan selama masa sewa.	penghasilan pembiayaan tanggungan.
4.	Sewa Tanah dan Bangunan	Tanah yang diperoleh dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau lainnya diperlakukan sesuai dengan PSAK 47 tentang Akuntansi Tanah.	Elemen tanah dan bangunan di dalam perjanjian sewa dinilai klasifikasinya secara terpisah sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi, dengan adanya pertimbangan bahwa tanah tidak memiliki umur ekonomis yang terbatas.
5.	Aset dalam sewa pembiayaan yang diklasifikasikan tidak dijual	<p>a. Disajikan sebagai aset tersedia untuk dijual, jika jumlah tercatat dapat dipulihkan lewat penjualan</p> <p>b. Pengukuran sebesar nilai lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi beban penjualan aset.</p> <p>c. Pengungkapan dimungkinkan untuk evaluasi dampak keuangan dari perubahan penggunaan aset.</p>	Perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009) tentang Aset Tidak Lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan.

### Keterbandingan PSAK 30 Sebelum dan Sesudah Konvergensi IFRS

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa perbedaan yang dapat dibandingkan antara PSAK 30 (Revisi 2007) dan PSAK 30 (Revisi 2011), yaitu:

1. PSAK 30 (Revisi 2011) berperan sebagai penyempurna dari PSAK sebelumnya berdasarkan aspek bahasa yang diperjelas dan lebih mendetail.
2. Istilah-istilah di dalam kedua PSAK memiliki definisi yang sama dan telah sesuai dengan standar.
3. Perbedaan perlakuan di umur manfaat ekonomis aset.
4. Perbedaan di pembayaran sewa minimum dan bagiannya.
5. Perbedaan perlakuan atas aset tanah dan bangunan, dimana PSAK 30 (Revisi 2011) menjelaskan klasifikasi dan pencatatannya terhadap aset terkait.

## KESIMPULAN

Sebuah perusahaan diharuskan untuk menggunakan standar akuntansi nasional dan internasional sebagai bentuk penggambaran kondisi keuangan perusahaan. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) merupakan jenis standar akuntansi nasional yang dibuat oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Sedangkan IFRS (*International Finance Reporting Standard*) merupakan standar akuntansi internasional yang dibuat oleh IASB (*international Accounting Standards Board*) yang mengatur tentang bagaimana sebuah jenis transaksi tertentu dan aktivitas akan dilaporkan di laporan keuangan. Seiring dengan berjalannya waktu, IFRS mengeluarkan banyak standar baru yang mendorong dilakukannya pembaharuan terhadap standar akuntansi nasional. Sebagai contohnya yaitu PSAK 30 mengenai sewa yang dilakukan revisi pada tahun 2007 dan tahun 2011. Dari dua fase pembaharuan tersebut, terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan, yaitu:

1. Penyempurnaan bahasa di PSAK 30 (Revisi 2011).
2. Penjelasan yang lebih jelas dan mendetail pada PSAK 30 (Revisi 2011).
3. Perbedaan perlakuan di umur manfaat ekonomis aset.
4. Perbedaan di pembayaran sewa minimum dan bagiannya.
5. Perbedaan perlakuan atas aset tanah dan bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahalik, "Perbandingan Standar Akuntansi Sewa PSAK 30 Sebelum dan Sesudah Adopsi IFRS serta PSAK 73," *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, vol. 11, no. 1, pp. 169-178, 2019. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.17612>
- A. Maulana and M. Mukhlisin, "Analisa Dampak Konvergensi IFRS ke dalam PSAK 13,16, dan 30 Terhadap Aktivitas Perdagangan Saham Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Islamic Finance & Business Review*, vol. 6, no. 2, 2011.
- A. S. W. Sitopu and D. R. Wardhani, *Dampak Pengimplementasian IFRS Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Indonesia: Studi Atas PSAK 30 Tentang Sewa*, Jakarta: Universitas Indonesia - Skripsi, 2014.
- E. D. P. Arum, "Implementation of International Financial Reporting Standard (IFRS) and The Quality of Financial Statement Information in Indonesia," *Research Journal of Finance and Accounting*, vol. 4, no. 19, 2013.
- F. H. Haris and R. Rachman, "Analisis Penerapan Akuntansi Sewa Guna Usaha (PSAK 30) Studi Kasus pada PT BFI Finance Indonesia Tbk," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, vol. 9, no. 1, pp. 109-120, 2021. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.486>
- I. A. Indonesia, *Pelaporan Korporat*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2022.
- I. A. Indonesia, *Exposure Draft: PSAK 30 (Revisi 2011)*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011.

- M. P. Laksana and Sudrajat, "Analisis Proyeksi Laporan Keuangan Perusahaan Penerbangan Saat Transisi PSAK 30 Menjadi PSak 73," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Kesatuan*, vol. 7, no. 3, pp. 369-378, 2019. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v7i3.296>
- M. Segal and G. Naik, "The expected impact of implementation of International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 - Leases," *Journal of Economic and Financial Sciences*, vol. 12, no. 1, pp. 1-12, 2019. <https://doi.org/10.4102/jef.v12i1.207>
- P. B. Saptono and I. Khozen, "Income Tax and VAT Issues Concerning Leases after IFRS Convergence in Indonesia," *The Indonesia Journal of Accounting Research*, vol. 24, no. 2, pp. 259-288, 2021. <http://doi.org/10.33312/ijar.538>
- R. N. Itasari and A. B. Kristanto, "Kerugian Konvergensi IFRS di Indonesia," *MODUS*, vol. 31, no. 1, 2019. <https://doi.org/10.24002/modus.v31i1.1915>
- R. Firaz, S. Benedictus and A. Firmansyah, "Dampak Implementasi PSAK 73: Rasio Keuangan, Thin Capitalization, dan Book Tax Difference," *EDUCORETAX*, vol. 2, no. 1, 2022.
- S. Khomsatun, "Penerapan Pengukuran Nilai Wajar PSAK-Konvergensi IFRS dan Dampaknya pada Pilihan Kebijakan Akuntansi di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol. 4, no. 2, pp. 967-984, 2016. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i2.4031>
- S. M. A. Suwardi, "Perlakuan Akuntansi Leasing Menurut PSAK 30 dan Menurut Peraturan Perpajakan," BPPK Kementerian Keuangan, 19 Agustus 2011. [Online]. Available: <https://bppk.kemenkeu.go.id/sekretariat-badan/berita/perlakuan-akuntansi-leasing-menurut-psak-30-dan-menurut-peraturan-perpajakan-174635>. [Accessed 22 June 2023].